

PENGUMUMAN PELELANGAN SEDERHANA DENGAN PASCAKUALIFIKASI
Nomor: 367/5000.MK/08/2013

Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Mahkamah Konstitusi RI pada Mahkamah Konstitusi akan melaksanakan Pelelangan Sederhana dengan pascakualifikasi untuk paket pekerjaan pengadaan barang sebagai berikut:

1. Paket Pekerjaan

- Nama paket pekerjaan : Pengadaan ATK untuk Persidangan Mahkamah Konstitusi RI Tahun Anggaran 2013
Lingkup pekerjaan : Pengadaan ATK untuk Persidangan Mahkamah Konstitusi RI
Nilai total HPS : Rp.750.568.970,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Lima Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Rupiah)
Sumber pendanaan : APBN Tahun Anggaran 2013

2. Persyaratan Peserta

- a. Paket Pekerjaan ini terbuka untuk penyedia Barang/Jasa yang memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil pada Subbidang sesuai paket yang dilelangkan.
- b. Peserta yang belum melakukan registrasi terlebih dahulu wajib registrasi di LPSE Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta Pusat, setiap hari kerja pukul 10.00 s.d. 14.30WIB.

3. Pelaksanaan Pengadaan

- a. Pendaftaran dan Pengunduhan (download) dokumen pengadaan dapat dilaksanakan melalui *website* <http://lpse.mahkamahkonstitusi.go.id> mulai tanggal 20 s.d. 29 Agustus 2013
- b. Penjelasan dokumen (Aanwijzing) akan dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2013 pukul 10:00 s.d. 14:00 WIB

4. Jadwal Pelaksanaan Pengadaan

No	Kegiatan	Hari/Tanggal	Waktu
a.	Download Dokumen Pengadaan	20 s.d. 29 Agustus 2013	10:00 s.d. 16:00 WIB
b.	Pemberian Penjelasan	22 Agustus 2013	10:00 s.d. 14:00 WIB
c.	Upload Dokumen Penawaran	23 sd 30 Agustus 2013	10.00 s.d. 14.00 WIB
d.	Pembukaan Dokumen Penawaran	30 Agustus 2013	14.05 WIB
e.	Evaluasi Penawaran	30 Agst s.d. 5 Sept 2013	
f.	Pengumuman Pemenang	5 September 2013	
g.	Masa Sanggah	5 s.d. 12 September 2013	
h.	Penerbitan SPPBJ	13 September 2013	

5. Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan dapat diwakilkan dengan membawa tanda pengenal dan surat tugas dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi/kepala cabang.
6. Seseorang dilarang mewakili lebih dari 1 (satu) perusahaan dalam mendaftar dan mengambil Dokumen Pengadaan.
7. Dokumen Pengadaan dapat diambil dalam bentuk cetakan, *softcopy* dan/atau diunduh melalui *website* <http://lpse.mahkamahkonstitusi.go.id/>

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Jakarta, 19 Agustus 2013